

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Nasution (2007) menyatakan beberapa kelemahan yang ditemukan pada sistem keuangan yang diterapkan Indonesia pada masa orde baru yaitu: (1) kelemahan dalam design dan pelaksanaan sistem pengendalian intern, (2) ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, (3) penyimpanan keuangan negara yang semrawut, (4) tidak adanya informasi tentang aset dan hutang negara, dan (5) pengungkapan laporan keuangan pemerintah yang tidak konsisten dan tidak memadai.

Langkah awal perkembangan sistem akuntansi dan pengelolaan keuangan Indonesia, ketika Pemerintah menetapkan Undang-Undang (UU) No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. UU No.17 Tahun 2003 Pasal 32 mengamanatkan bahwa bentuk dan isi laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Pemerintah menetapkan Peraturan Pemerintah (PP) No. 24 Tahun 2005 yang kemudian direvisi menjadi PP No. 71 Tahun 2010 tentang SAP berbasis akrual sebagai penjabaran teknis dari UU yang ditetapkan.

SAP berperan sebagai konsep dasar penyusunan dan pengembangan Standar Akuntansi di Pemerintahan, merupakan acuan bagi Komite Standar Akuntansi Pemerintahan, penyusun laporan keuangan, pemeriksa, dan pengguna

laporan keuangan dalam mencari pemecahan atas sesuatu masalah yang belum diatur dalam SAP. (PP No.71 Tahun 2010 Pasal 1)

Tujuan utama reformasi akuntansi pemerintahan sebagai langkah meningkatkan kualitas laporan keuangan yang disajikan pemerintah, demi terwujudnya *good governance*. Reformasi keuangan institusi pemerintahan dilatarbelakangi tujuan pemerintah untuk meningkatkan tanggung jawabnya dalam penggunaan APBN. Mardiasmo (2009:20) menyatakan tuntutan akuntabilitas sektor publik terkait dengan perlunya dilakukan transparansi dan pemberian informasi kepada publik dalam rangka pemenuhan hak-hak publik.

Laporan keuangan pemerintah harus memenuhi kriteria laporan keuangan yang berkualitas, ditetapkan dalam kerangka konseptual akuntansi pemerintahan PP No. 71 Tahun 2010, yaitu: keandalan, relevan, dapat diperbandingkan, dan dapat dipahami. Pemenuhan terhadap karakteristik tersebut, sebagai pertanggungjawaban bahwa pemerintah telah mengelola dana publik yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang ditetapkan.

Tabel 1. 1
Perkembangan Opini BPK Terhadap LKKL 2009 -2013

LKKL	Opini								Jumlah
	WTP	%	WDP	%	TW	%	TMP	%	
Tahun 2009	44	57%	26	33%	0	0%	8	10%	78
Tahun 2010	52	63%	29	35%	0	0%	2	2%	83
Tahun 2011	66	77%	18	21%	0	0%	3	2%	87
Tahun 2012	68	74%	22	24%	0	0%	2	2%	92
Tahun 2013	64	74%	19	22%	0	0%	3	4%	86

Sumber : <http://www.bpk.go.id>

Analisis dari Tabel 1.1 Hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas Laporan Keuangan Kementerian dan Kelembagaan (LKKL) selama kurun waktu Tahun 2009 s.d. 2013. Peningkatan LKKL yang mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) pada tahun 2009 s.d 2011 mengalami peningkatan dari 57% menjadi 77%. Penurunan presentase LKKL pada dua tahun terakhir LKKL yang memperoleh opini WTP pada tahun 2012 dan 2013. Presentase LKKL yang mendapat opini WTP pada 2012 dan tahun 2013 dari 77% menjadi 74%.

Neraca Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) tahun 2013 (*Audited*) menyajikan nilai Aset Tetap sebesar Rp.1.709.85 Triliun. Aset Tetap tahun 2013 terdiri dari Aset Tetap berupa Tanah, Peralatan dan Mesin, Gedung dan Bangunan, Jalan, Irigasi, dan Jaringan, Aset Tetap Lainnya, serta KDP. Aset Tetap belum dilakukan IP senilai Rp.636.108.227.405,00 salah satunya ditemukan pada Perpustakaan RI berupa bahan pustaka sebanyak 2271.766 judul dengan jumlah 881.4.39 eksemplar dan hibah monografi/buku dan VCD sebanyak 77.723 eksemplar belum dilakukan penilaian dan disajikan sebagai Aset Tetap Lainnya. (LHP-LKPP tahun 2013 : 152)

Catatan atas laporan keuangan (Calk) LKPP mengungkapkan bahwa perlu adanya normalisasi aset tetap terhadap aset tetap yang diperoleh sebelum tahun 2013. BPK menyatakan adanya temuan atas normalisasi aset tetap pada laporan yang disajikan Perpustakaan RI. Penormalan perbedaaan kuantitas dan nilai pada saat dilakukan migrasi aplikasi yang baru belum semuanya diselesaikan, dengan

demikian perhitungan koreksi penyusutan awal dalam aplikasi tidak berjalan sebagai mana mestinya.

Tabel 1.2
Perkembangan Opini BPK pada Laporan Keuangan Perpustakaan Nasional Republik Indonesia

Kementerian Negara / Lembaga	2009	2010	2011	2012	2013
Perpustakaan Nasional	WDP	WTP	WTP	WTP	WDP

Sumber : bpk.go.id

Salah satu kriteria pemberian opini Laporan Keuangan di Pemerintahan adalah evaluasi atas efektivitas Sistem Pengendalian Internal (SPI). Evaluasi dari penurunan opini yang diperoleh, sebagai Indikasi adanya kelemahan dalam SPI yang menyangkut pencatatan atas aset tetap (www.bpk.go.id data diambil pada tanggal 30/4/2015 pukul 16.15 WIB). Pengendalian internal yang diterapkan di Pemerintahan dirancang dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Interen Pemerintah (SPIP).

Hasil evaluasi BPK atas sistem akuntansi dan prosedur pengamanan sumber daya yang dikelola pemerintah ditetapkan dalam SPIP. Entitas pelaporan yang memperoleh opini WTP memiliki SPIP yang lebih memadai dibandingkan dengan entitas pelaporan yang memperoleh opini WDP. Hal tersebut dapat dilihat dari beberapa penelitian sebelumnya yang membahas mengenai pengaruh penerapan SPI terhadap kualitas laporan keuangan.

Pengaruh dari aspek sistem pengendalian internal juga telah beberapa kali diteliti sebelumnya dan dihitung signifikansi pengaruhnya terhadap kualitas laporan keuangan. Yuniar Eskawati Yuniar (2013) dalam penelitiannya

Wendy Rabiviani, 2015 |

Pengaruh Penerapan Sistem Pengendalian Internal terhadap Kualitas Laporan Keuangan (Studi pada Perpustakaan Nasional RI), Fakultas Ekonomi Universitas Pasundan, Bandung

menyatakan bahwa Sistem Pengendalian Internal (SPI) berpengaruh pada kualitas laporan keuangan perusahaan dan dapat meningkatkan Kualitas Laporan Keuangan. Tuti Herawati (2014) dalam penelitiannya studi kasus pada organisasi perangkat Pemda Cianjur menyebutkan bahwa pengaruh SPI berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan Pemerintah Daerah yaitu sebesar 83%. Indriya Kartika (2013) dalam penelitiannya dengan judul Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Terhadap Kualitas Laporan Keuangan dan Implikasinya Terhadap Akuntabilitas Keuangan penelitian pada laporan realisasi anggaran di Pemda Kabupaten Wilayah Jawa Barat menyatakan bahwa sistem pengendalian internal berpengaruh 69,9% terhadap laporan keuangan Pemerintah Kota Bandung.

Perpusnas RI memperoleh opini WDP pada tahun 2013, periode sebelumnya mendapat opini WTP. Penurunan kualitas laporan keuangan yang disajikan menindikasikan adanya beberapa kelemahan dalam penyajian laporan keuangan. Penjabaran diatas menggambarkan pengaruh sistem pengendalian internal terhadap kualitas laporan keuangan yang disajikan. Berkaitan dengan permasalahan tersebut, maka penelitian ini akan mempelajari pengaruh sistem pengendalian intern pada badan pemerintah terhadap kualitas nilai laporan keuangan yang disajikan dengan judul:

“PENGARUH SISTEM PENGENDALIAN INTERN TERHADAP KUALITAS LAPORAN KEUANGAN ”. (Studi kasus pada Perpustakaan Nasional Republik Indonesia)

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan fenomena dan permasalahan yang diuraikan sebelumnya peneliti mengidentifikasi beberapa masalah, yaitu:

1. Bagaimana Perpustakaan RI mengelola dana publik sehingga terwujud pemerintahan yang baik (*good governance*) di Indonesia?
2. Bagaimana Perpustakaan RI melakukan pencatatan, pengelompokan, dan penyajian laporan keuangan?
3. Bagaimana pengawasan terhadap kualitas laporan keuangan di Perpustakaan Nasional Republik Indonesia (Perpustakaan RI)?
4. Bagaimana prosedur pengendalian internal terhadap pengelolaan keuangan pada Perpustakaan RI?
5. Sejauh mana pengendalian internal yang dilakukan berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan yang disajikan?

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas, penulis mengidentifikasi masalah penulisan skripsi sebagai berikut:

1. Bagaimana Sistem Pengendalian Intern (SPI) pada Perpustakaan Nasional Republik Indonesia.
2. Bagaimana kualitas Laporan Keuangan pada Perpustakaan Nasional Republik Indonesia.
3. Seberapa besar pengaruh Sistem Pengendalian Internal (SPI) terhadap

kualitas laporan Keuangan pada Perpustakaan Nasional RI

1.4 Maksud dan Tujuan

1.4.1 Maksud Penelitian

Maksud dari penelitian yang penulis lakukan adalah untuk memperoleh data dan informasi mengenai penerapan sistem pengendalian intern dan pengaruhnya pada kualitas laporan keuangan.

1.4.2 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian yang ingin di capai oleh penulis, yaitu:

1. Mengetahui pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern (SPI) pada Perpustakaan Nasional Republik Indonesia.
2. Mengetahui kualitas laporan keuangan yang disajikan oleh Perpustakaan Nasional Republik Indonesia.
3. Mengetahui seberapa besar pengaruh Sistem Pengendalian Intern (SPI) terhadap Kualitas Laporan Keuangan di Perpustakaan Nasional Republik Indonesia.

1.5 Kegunaan Penelitian

Dari penulisan penelitian ini diharapkan berguna dan bermanfaat bagi semua pihak. Adapun kegunaan dari penelitian dapat ditinjau dari dua aspek, yaitu:

1.5.1 Kegunaan Praktis

Pada sisi pendekatan praktis penelitian ini bermanfaat:

1. Bagi pemerintah

Diharapkan Hasil penelitian ini dapat berguna dalam penerapan SPI dimana dalam pelaksanaannya dapat mempengaruhi kualitas laporan keuangan. Sebagai bahan evaluasi agar institusi pemerintahan dapat menyajikan laporan Keuangan yang disajikan berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintah.

2. Bagi penulis

Sebagai media yang tepat dalam menerapkan ilmu yang di peroleh selama perkuliahan terutama kaitannya dengan Akuntansi keuangan, akuntansi sektor publik dan pengendalian intern

3. Bagi pembaca umum

Sebagai tambahan pengetahuan terutama dalam bidang pengendalian interen pada pemerintahan pusat dan pengaruh nya teradap kualitas laporan keuangan.

1.5.2 Kegunaan Teoritis

Bagi dunia akademis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan litelatur Akuntansi di Sektor Pemerintahan terutama dalam pengembangan sistem pengendalian interen dan dapat dijadikan dasar bagi penelitian- penelitian selanjutnya.

Manfaat teoritis dari penelitian ini adalah untuk mengembangkan ilmu mengenai kualitas laporan keuangan terutama pada aspek pengaruh penerapan sistem pengendalian internal (SPI) dalam pengaruhnya menentukan kualitas laporan keuangan.

1.6 Lokasi dan Waktu Penelitian

Dalam penelitian ini penulis memilih lokasi penelitian di Perpustakaan Nasional Republik Indonesia. Jl. Salemba Raya No. 28 A, Jakarta Pusat Daerah Khusus Ibukota Jakarta, 10430, Indonesia.

Penelitian dilaksanakan Penulis selama 2 bulan mulai dari Tanggal 2 Maret 2015 sampai dengan Tanggal 2 Mei 2015.